

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN JAYAWIJAYA SEBELUM DAN SESUDAH  
PEMEKARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2001-2004  
(SESUAI DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS  
BAGI PROVINSI PAPUA)**

**SKRIPSI**

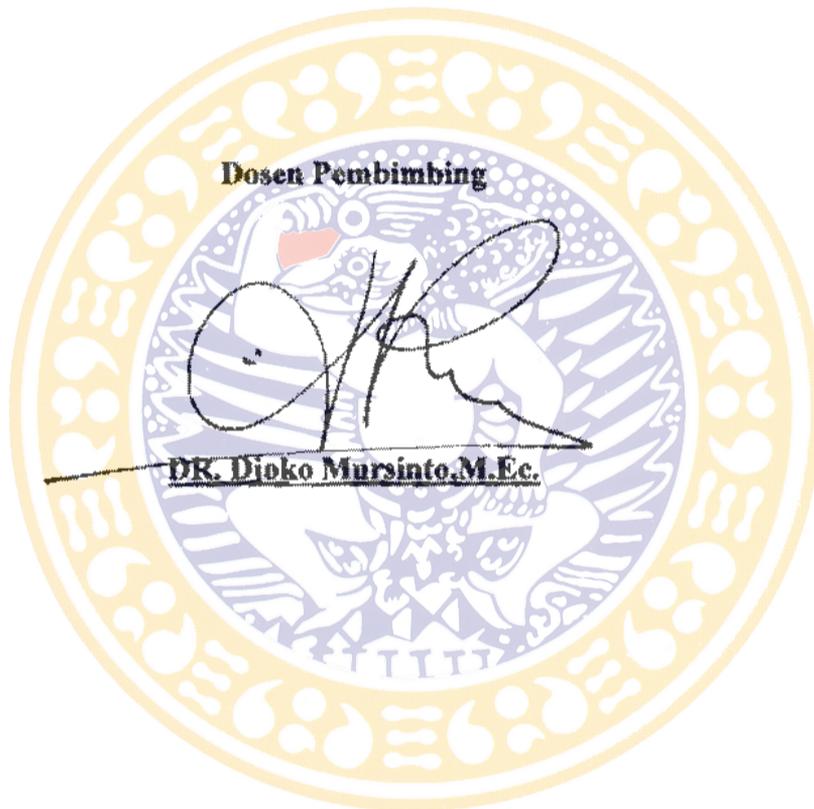
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN



**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

Surabaya, 10/8-2005

**Skripsi telah selesai dan siap diuji**



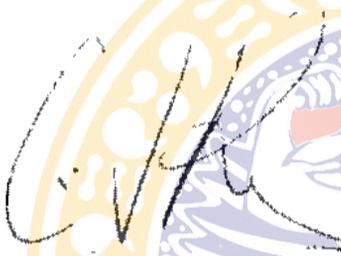
SKRIPSI

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA  
TAHUN 2001-2004  
(SESUAI DENGAN UU No.21 TAHUN 2001  
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA)**

**DIAJUKAN OLEH :  
ARELY DINGE  
No. Pokok 049916488**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

**DOSEN PEMBIMBING,**

  
**DR. DJOKO MURSINTO, M.Ec.**

**TANGGAL.....** 23/4 2005

**KETUA PROGRAM STUDI,**

  
**Dra. Ec. H. SRI KUSREN, M.Si.**

**TANGGAL.....** 26-09-2005

## ABSTRAKSI

Undang-Undang No.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk mengali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. Undang-Undang No.21 tahun 2001 juga memberikan penerimaan yang lebih besar dari bagi hasil sumberdaya alam bagi Provinsi Papua, diharapkan dengan adanya penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil yang lebih besar, pemerintah daerah di Provinsi Papua dapat memajukan pembangunan di Provinsi Papua yang jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Papua sesuai dengan UU No. 26 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Papua, memberikan dampak yang cukup besar bagi beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten Jayawijaya yang dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru yaitu Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang, juga mengalami dampak dari pemekaran tersebut khususnya dalam bidang keuangan.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayawijaya baik sebelum pemekaran maupun sesudah pemekaran. Kemampuan keuangan daerah dapat diketahui dengan cara mencari derajat desentralisasi fiskal, posisi fiskal serta Rasio kemandirian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Jayawijaya masih sangat rendah dan setelah pemekaran terjadi penurunan derajat desentralisasi fiskal, sebelum pemekaran rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 1,04% setelah pemekaran turun menjadi 0,98%. Posisi fiskal Kabupaten Jayawijaya baik sebelum maupun sesudah pemekaran kurang kuat, hal tersebut dapat dilihat dari nilai posisi fiskal Kabupaten Jayawijaya yang kurang dari 1. Setelah pemekaran posisi fiskal mengalami peningkatan, dari sebelum pemekaran sebesar 0,24 dan setelah pemekaran meningkat menjadi 0,63. Rasio kemandirian Kabupaten Jayawijaya sangat rendah karena nilainya kurang dari 25%, rasio kemandirian Kabupaten Jayawijaya sebelum pemekaran sebesar 1,19% dan setelah pemekaran turun menjadi 1,18%.